

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera, Jou Suba,,,,,Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karenatelah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perikanan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, mendeskripsikan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2021beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh yang merupakan langkah untuk mewujudkan Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya, guna mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2019 – 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kami mohon saran dan koreksi yang bersifat membangun guna perbaikan dokumen LKIP Dinas Perikanan Tahun 2021.

Syowi ma kasumasa.

Biak, Januari 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Biak Numfor



EFFENDI GIRISA, S.Pi.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690424 199703 1 001



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERIKANAN TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera, Jou Suba,,,,,Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karenatelah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perikanan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, mendeskripsikan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2021beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh yang merupakan langkah untuk mewujudkan Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya, guna mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2019 – 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kami mohon saran dan koreksi yang bersifat membangun guna perbaikan dokumen LKIP Dinas Perikanan Tahun 2021.

Syowi ma kasumasa.

Biak, Januari 2022
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Biak Numfor

EFFENDI IGIRISA, S.Pi.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690424 199703 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perikanan. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu: Jumlah Produksi Perikanan dan Tingkat konsumsi ikan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan capaian masing-masing berturut-turut: 111,40%, dan 101,45%. dengan nilai pencapaian sangat berhasil. Realisasi anggaran belanja yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Rp. 12.353.032.511 atau 97,07% dari pagu dana sebesar Rp. 12.725.644.826. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai tahun 2021, antara lain: 1) Minimnya kapal penangkapan ikan diatas 10 GT, dan teknologi pendukung penangkapan ikan, sehingga berpengaruh terhadap produksi perikanan di Kabupaten Biak Numfor. 2) Rendahnya sumberdaya manusia pengembangbiakan ikan dan terbatasnya induk/benih ikan serta ketersediaan pakan; 3) Lemahnya kapasitas kelembagaan akses modal, informasi dan inovasi teknologi pada usaha perikanan. 4) Belum optimalnya pengawasan dalam pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Jumlah Sumberdaya Manusia pada Dinas Perikanan.....	9
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
4. Anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2021.....	10
5. Isu-isu Strategis dan Prioritas Dinas Perikanan Tahun 2021	11
6. Landasan Hukum.....	11
BAB II PERENCANAAN KNERJA.....	14
Perencanaan Strategis.....	14
A. Rencana Strategis, dan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor...	14
B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	15
C. Program dan Kegiatan	16
D. Indikator Kinerja Utama	16
E. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021	19
B. Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021	22
BAB IV PENUTUP	27
Simpulan	27
Saran	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Perincian Golongan dan Pangkat pada Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor.....	9
Tabel 1.2 Jumlah PNS dan CPNS menurut pendidikan 2021.....	9
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perikanan.....	15
Tabel 2.2 Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja, Indikator dan Sasaran Strategis.....	17
Tabel 2.4 Jumlah Anggaran Program Utama dan Program Pendukung.....	18
Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perikanan.....	19
Tabel 3.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Tahun 2021.....	20
Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKU Tahun 2021.....	20
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 Terhadap Target RPJMD.....	21
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya	22
Tabel 3.6 Komparasi Jumlah Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan antara Daerah Dan Pemerintah Pusat	22
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021	23
Tabel 3.8 Produk Domestik Regional Bruto dan DBH Sub Kelautan Tahu 2021.....	26
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2020 dan Tahun 2021.	27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor;
2. Lampiran 2. Surat Perintah Tugas

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah di daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksana kegiatan di sektor kelautan dan perikanan senantiasa dihadapkan pada tantangan yang mengikutidynamikaregulasi, dan juga pengelolaan usaha nelayan yang masih didominasi oleh usaha yang berskala kecil, modal terbatas, armada penangkapan ikan dilaut pada umumnya masih berskala kecil menggunakan perahu tanpa motor dan motor tempel yang secara ekonomis sudah tidak mampu untuk beroperasi seta tingkat pendidikan masyarakat pesisir masih rendah.

Pengelolaan sektor perikanan yang meliputi bidang penangkapan, budidaya dan izin usaha perikanan pada tahun 2021, mengalami ruaya yang semakin menurun diakibatkan isu pandemik covid-19, dampak ini berakibat semakin rendahnya usaha para nelayan, petambak maupun pengelola perikanan baik secara kelompok maupun perorangan.

Selanjutnya dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintah yang berpedoman pada azas akuntabilitas dan transparan dimana setiap penyelenggaraan negara wajib untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja kepadasemuapihak.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, PeraturanPresidenNomor29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yangdilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat

sebelumnya. LKIP juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab dapat diwujudkan.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Kepada Bupati Biak Numfor atas pengelolaan anggaran dan pelaksana program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dalam tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian dirumuskan suatu kesimpulan menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor ke depan.

Gambaran Umum Organisasi

Dasar Pembentukan dan Aspek Strategis Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor. Institusi ini berganti nama menjadi Dinas Perikanan sebelumnya Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam perkembangannya terjadi revitalisasi uraian jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang diregulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2020, sebagaimana tertera pada struktur dibawah.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten, sebagaimana tertera dibawah :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 - Seksi Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Tangkap
 - Seksi Pemberdayaan Kenelayanan
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 - Seksi Pengembangan Budidaya dan Penerapan Teknologi Perikanan
 - Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Perizinan
 - Seksi Produksi Usaha Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan
- e. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan
 - Seksi Bina Mutu Produk Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan
 - Seksi Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
 - Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas fungsi dan rincian dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perikanan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - 1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati;
 - 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan dilingkungan dinas Perikanan;
- 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dinas.
 - b. Penatausahaan urusan umum;
 - c. Penatausahaan kepegawaian;
 - d. Penatausahaan keuangan; dan
 - e. Pengelolaan inventaris dinas.

3. Bidang Perikanan Tangkap.

- 1). Bidang perikanan tangkap, mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan penyiapan sarana prasarana penerapan teknologi tangkap, pemberdayaan kenelayanan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2). Dalam pelaksanaan tugas sebagai dimaksud pada ayat(1) bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap;
 - c. Pembinaan dan pengawasan usaha jasa perikanan tangkap;
 - d. Pembinaan dan pengawasan standar mutu usaha jasa perikanan tangkap;
 - e. Pembentukan kelompok perikanan tangkap di lokasi kelompok-kelompok nelayan;
 - f. Perumusan sarana prasarana dan penerapan teknologi tangkap;
 - g. Perumusan pemberdayaan kenelayanan;

- h. Pengkoordinasian pengelolaan sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan;
 - i. Pembinaan dan pembentukan kelompok perikanan tangkap;
 - j. Pengevaluasian hasil kerja bawahan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
4. Bidang Perikanan Budidaya.
- 1) Bidang perikanan budidaya, mempunyai tugas yaitu membantu tugas-tugas dinas penerapan teknologi perikanan, pembinaan kelembagaan dan perijinan budidaya ikan serta produksi usaha perikanan budidaya serta usaha perikanan budidaya dan kesehatan ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perikanan budidaya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya dan penerapan teknologi;
 - b. Penyusunan program, mengevaluasi, dan penyusunan laporan dinas di bidang perikanan budidaya dan penerapan teknologi budidaya;
 - c. Penyusunan rencana pembinaan kelembagaan dan perijinan budidaya ikan;
 - d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan produksi usaha perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan strategis, rencana kerja pengembangan budidaya dan penerapan teknologi perikanan;
 - f. Pengkoordinasian produksi usaha perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
 - g. Pelaksanaan penyusunan rancangan kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perikanan;
 - i. Penyusunan rencana kerja dinas perikanan 5 tahun kedepan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan bidang-bidang lain untuk penyusunan program kerja;
 - k. Pembinaan, pembimbingan, dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam lingkup program kerja.
 - l. Pengevaluasian hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;

- m. Pelaksanaan evaluasi program untuk mengetahui tingkat pencapaian program kerja serta permasalahan yang dihadapi serta mencari penyelesaian masalah; dan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
5. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan .
- 1) Bidang pelayanan usaha perikanan, mempunyai tugas yaitu membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan, pemasaran hasil produksi perikanan serta pengembangan usaha kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan usaha perikanan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - b. Perumusan pemasaran hasil produksi perikanan;
 - c. Perumusan pengembangan usaha dan kelembagaan;
 - d. Perencanaan bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - e. Penyusunan rencana pemasaran hasil produksi perikanan;
 - f. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan pelayanan hasil produksi perikanan;
 - g. Pelaksanaan penyusunan rancangan strategis, rencana kerja pengembangan usaha kelembagaan;
 - h. Penyusunan rancangan kerja perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas-tugas di lapangan;
 - i. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perikanan bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - j. Penyusunan rencana pengembangan usaha dan kelembagaan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan bidang-bidang lain untuk penyusunan program kerja.

- l. Pembinaan, pembimbingan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam lingkup program kerja;
 - m. Pengevaluasian hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;
 - n. Pelaksanaan evaluasi program untuk mengetahui tingkat pencapaian program kerja serta permasalahan yang dihadapi serta mencari penyelesaian masalah; dan
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

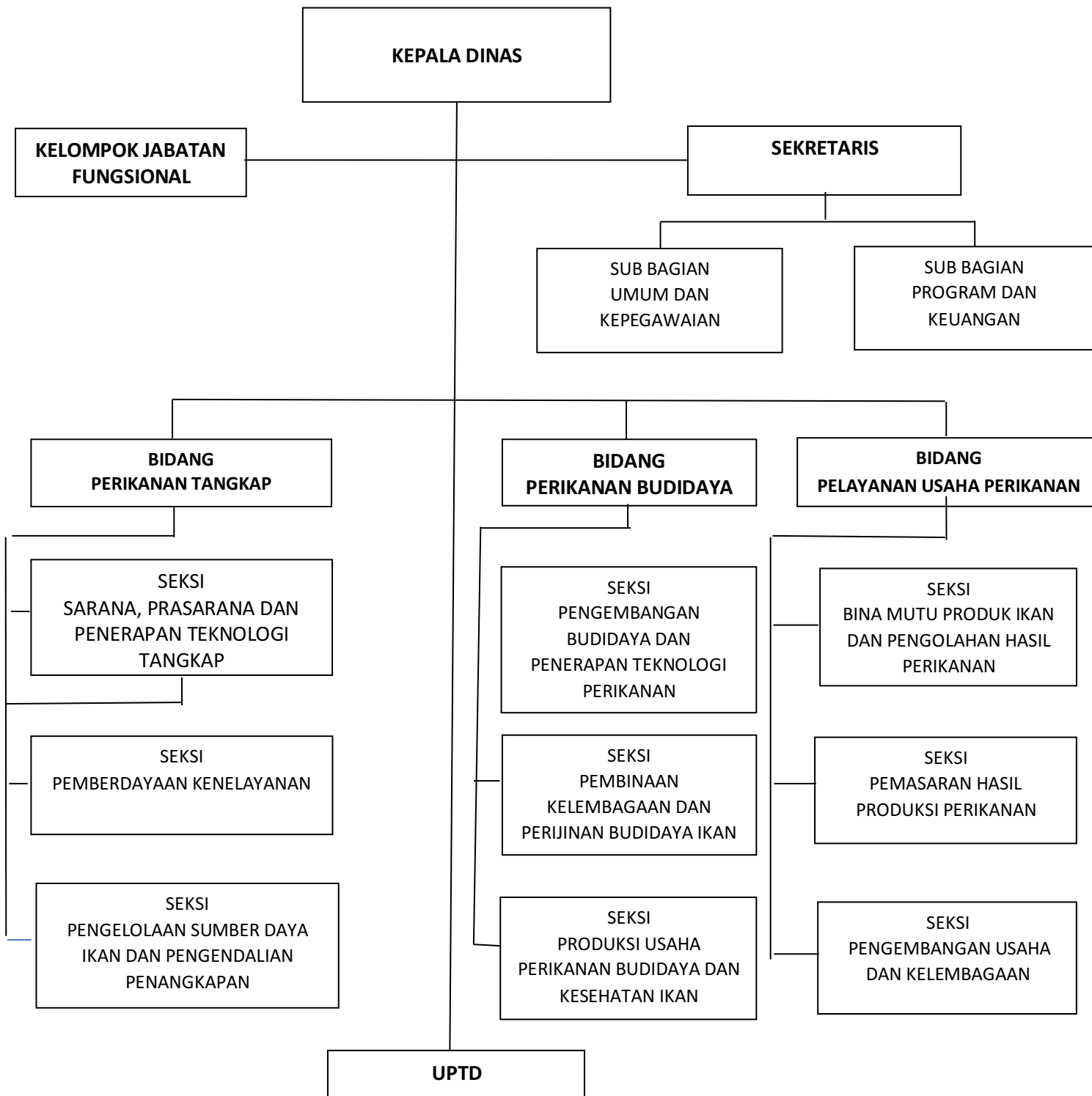
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas melalui pembinaan sekretaris, kepala bidang. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing:

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- 6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.

Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan PERDA Kabupaten Biak Numfor No. 10 Tahun 2019.



2. Jumlah Sumberdaya Manusia pada Dinas Perikanan.

Sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor didukung oleh 50 orang pegawai negeri struktural dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Daftar Perincian Golongan dan Pangkat pada Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda/IV/c	1 Pegawai
2	Pembina Tk. I /IV/b	0 Pegawai
3	Pembina /IV/a	5 Pegawai
4	Penata Tk. I /III/d	10 Pegawai
5	Penata /III/c	5 Pegawai
6	Penata Muda Tk I /III/d	7 Pegawai
7	Penata Muda III/a	1 Pegawai
8	Pengatur Tk. I /II/d	1 Pegawai
9	Pengatur Tk. I /II/c	10 Pegawai
10	Pengatur Muda Tk. I /II/b	5 Pegawai
11	Pengatur Muda /II/a	4 Pegawai
12	Juru Tk. I /I/d	1 Pegawai

Tabel. 1.2 Jumlah PNS dan CPNS menurut pendidikan.

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Starata 3 (S3)	0 Pegawai
2	Starata 2 (S2)	6 Pegawai
3	Strata 1 (S1)	16 Pegawai
	Diploma IV (DIV)	-
4	Diploma III	6 Pegawai
5	SLTA	18 Pegawai

6	SLTP	0 Pegawai
7	SD	1 Pegawai
8	DII I	6 Pegawai
9	SLTA	18 Pegawai
10	SLTP	0 Pegawai
11	SD	1 Pegawai

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas pokok

- a) Melaksanakan urusan pemerintah dibidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan;
- c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
- e) Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2021.

Dinas Perikanan mendapatkan dana pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 12.725.644.826, dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

- 1). Jumlah Dana Alokasi Khusus = Rp. 6.422.000.000,-
- 2). Jumlah Dana Otsus = Rp. 500.000.000,-
- 3). Jumlah Dana DAU = Rp. 503.563.846,-
- 4). Jumlah Dana BHP = Rp. 1.428.350.000,-
- 5). Jumlah Dana DAU untuk BTL = Rp. 3.871.730.980

5. Isu-isu Strategis dan Prioritas Dinas Perikanan Tahun 2021.

Isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor diperoleh dari analisis berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Minimnya kapal penangkapan ikan diatas 10 GT, dan teknologi pendukung penangkapan ikan, sehingga berpengaruh terhadap produksi perikanan di Kabupaten Biak Numfor.
2. Rendahnya sumberdaya manusia pengembangbiakan ikan dan terbatasnya induk/benih ikan serta ketersediaan pakan;
3. Rendahnya pengelolaan sarana rantai dingin (*cold storage*), yang berdampak kepada pendapatan asli daerah dan
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan akses modal, informasi dan inovasi teknologi pada usaha perikanan.
5. Degradasi ekosistem sumber daya ikan sebagai dampak perubahan iklim dan faktor cuaca yang cukup ekstrim.
6. Belum optimalnya pengawasan dalam pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.
7. Belum terintegrasi system produksi dari hulu ke hilir.

6. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor;
11. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Nomor 007/50/2022 Tanggal 14 Januari 2022, Tentang Nama-nama Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis dan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor

Penyusunan LKIP tahun 2021 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2019–2023 yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Biak Numfor, mengacu terhadap Visi Bupati Biak Numfor terpilih Tahun 2019 -2023, yaitu: “Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”, dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif dan kreatif;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan suasana aman dan damai dalam masyarakat dilandasi nilai keagamaan dan adat istiadat;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;

Misi yang terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perikanan terletak pada Misi Kedua dan Ketiga yang bertujuan “mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Berdaya Saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Misi dan Tujuan Kabupaten tersebut dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis operasional Dinas yang lebih spesifik dan terukur. Indikator sasaran yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya selanjutnya ditetapkan menjadi IKU Dinas Perikanan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Nomor: 523/336.b/DKP tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor 2019-2023.

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.

Mengacu pada Misi kedua dan ketiga, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan perubahan Renstra Dinas Perikanan 2019-2023 dapat dijabarkan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	Presentasi pelayanan administrasi perkantoran yang memadai.
	Meningkatnya kualitas aparatur	Presentase kinerja aparatur yang akuntabel
2. Meningkatkan pendapatan & Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sub sektor perikanan	Jumlah kontribusi capaian PDRB Sub sektor perikanan dalam rupiah
	Meningkatnya usaha di bidang perikanan kelompok nelayan mandiri	Cakupan bina kelompok nelayan mandiri
	Meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan	Rata-rata pendapatan nelayan dalam (Rp)
	Meningkatnya pelayanan bagi nelayan	Cakupan nelayan yang memiliki kartu nelayan/Kusuka (org)
3. Meningkatkan Gemar Makan Ikan kepada Masyarakat	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	Tingkat konsumsi Ikan (Persentase)
4. Meningkatkan fungsi sarana prasarana pengolahan ikan dan tempat pelelangan ikan	Memfungsikan SKPT/Pangkalan pendaratan Ikan secara optimal	Berfungsinya SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara optimal (persentase)
5. Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap(Ton)
	Meningkatnya produksi budidaya	Jumlah produksi budidaya (Ton)

C. Program dan Kegiatan.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas pada tahun 2021 diimplementasikan melalui 4 program dengan 9 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Administrasi umum perangkat daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Pengelolaan Pembudidayaan ikan.

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

1. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota.

D. Indikator Kinerja Utama.

Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021, telah menyusun rencana kerja tahunan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama:

a. Sasaran strategis meliputi:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat;

.

b. Indikator kinerja utama meliputi:

1. Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Jumlah konsumsi ikan masyarakat.

Tabel 2.2 Tabel keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	S a s a r a n	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.	Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
2.	Terwujudnya peningkatan konsumsi ikan masyarakat	Tingkat konsumsi ikan masyarakat

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran atau dokumen yang berisikan penugasan pimpinan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan sasaran/program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target dan anggaran. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang disepakati. Dinas Perikanan dalam melaksanakan program kegiatannya telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Tabel Perjanjian Kinerja Indikator dan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kabupaten Biak Numfor	84.075 Ton	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota. 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan	6.209.880.000 500.000.000
2	Meningkatnya	Tingkat	48,2		

	Tingkat Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan Kabupaten Biak Numfor	Persen	Pembudidayaan ikan. 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan . - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	212.120.000
Total Anggaran Indikator Strategis					6.922.000.000

Tabel 2.4 Jumlah Anggaran program utama dan program pendukung

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana APBD/APBN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.375.294.826	APBD
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.638.230.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	500.000.000	APBD
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan .	212.120.000	APBD

Jumlah Anggaran keseluruhan program (utama dan rutin) Rp. 12.725.644.826

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100%
2. Berhasil : 80-100%
3. Cukup Berhasil : 60-79%
4. Tidak Berhasil:

Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perikanan.

Indikator	Target 2021	Keterangan
Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap	84.075 Ton	Semakin besar capaian produksi ikan maka ketersediaan sumber protein hewani sudah terpenuhi bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
Tingkat konsumsi ikan masyarakat	48,2 Persen	Semakin besar capaian persentase konsumsi ikan, maka tingkat konsumsi ikan sudah terpenuhi bagi masyarakat

Tabel 3.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Tahun 2021

No.	Komodiiti	Produksi (ton)	Harga Rerata (Rp)
1	Perikanan Darat	2.021	50.000
2	Perikanan Laut		
	Pelagis Besar	28.680,23	65.000
	Pelagis Kecil	32.351,76	65.000
	Demersal	30.610,28	65.000
3	Umum		
	Budidaya Rumput Laut	0	0

Sumber data: Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKU Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.	Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap	84.075 Ton	93.663,27 Ton	111,40	84.252,97	100,77
Terwujudnya peningkatan konsumsi ikan masyarakat	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	48,2 Persen	48,9 Persen	101,45	47,7	100,85

Dari tabel diatas dapat diketahui:

- 1) Capaian IKU tahun 2021 seluruhnya diatas 100 persen (Sangat Berhasil) dari target yang ditetapkan,
- 2) Capaian IKU terjadi kenaikan prosentase dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 Terhadap Target RPJMD.

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Tahun 2021			KETERANGAN
			TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	84.075	93.663,27	111,40	Tercapai
2	Tingkat Konsumsi Ikan	%	48,2	48,9	101,45	Tercapai
Rata-rata capaian					106,43	

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor

Pencapaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Capaian kinerja untuk indikator Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 93.663.27 ton yaitu melebihi dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 84.075 ton dengan capaian sebesar 111,40%. Hal ini juga didukung oleh kebijakan strategis dari pimpinan daerah untuk mendorong salah satu potensi unggulan, yaitu bidang perikanan untuk dapat meningkatkan ekspor sumberdaya ikan.

2. Tingkat Konsumsi Ikan.

Capaian kinerja untuk indikator konsumsi ikan masyarakat di kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 mencapai 48,9 %. Hasil capaian ini melebihi target yaitu 48,2 %. dengan capaian sebesar 101,45%. Hal ini disebabkan semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang tinggi protein untuk menaikkan imunitas tubuh di masa pandemi covid 19.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	84.188,47	84.252,97	93.663,27	85
2	Tingkat Konsumsi Ikan	%	46,5	47,7	48,9	50

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor

Tabel 3.5 yaitu Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2021 dan tahun sebelumnya, menggambarkan bahwa dari tahun 2019 terjadi kenaikan pada produksi Perikanan dan juga kenaikan Tingkat Konsumsi Ikan sampai .dengan tahun 2021, sedangkan perbandingan produksi perikanan tangkap dan tingkat konsumsi ikan antara Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Komparasi Jumlah Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan Antara Daerah dan Pemerintah Pusat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI PEMKAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2021	REALISASI PEMPROV. PAPUA TAHUN 2019/2020	REALISASI PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	93.663,27	231.748*	6.493.258*
2	Tingkat Konsumsi Ikan	%	48,9	64,13	56,39

Sumber data : Statistik Indonesia 2022, BPS Tahun 2022(* data sementara/keterbatasan data).

Berdasarkan Tabel 3.6, menggambarkan bahwa adanya perbedaan jumlah produksi perikanan tangkap sektor perikanan di Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 sebesar 93.663,27 ton, yang disandingkan dengan jumlah produksi tangkapan di wilayah Papua pada Tahun 2020, sebesar 231.748 ton sedangkan produksi tangkapan Nasional dengan asumsi tahun yang sama sebesar 6.493.258 ton, analognya dapat dikatakan bahwa Sektor Perikanan di wilayah Kabupaten Biak Numfor memberikan kontribusi masing-masing

sebesar 1,4% terhadap Produksi Perikanan Tangkap Nasional dan turut mendorong Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Papua sebesar 40,4%.

Deskripsi Komparasi Tingkat Konsumsi Ikan, yang disajikan, pada Tabel 3.6, menjelaskan bahwa tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor jika disandingkan dengan wilayah Papua sebesar 76,3% sedangkan jika dikomparasikan dengan tingkat Nasional konsumsi ikan kita sebesar 86,7%. Gambaran ini menjelaskan bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor tergolong tinggi.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Biak Numfor, masih dapat ditingkatkan dengan arah dan kebijakan yang mengakuisisi program/kegiatan perikanan budidaya, balai benih ikan air laut/tawar, peningkatan sumberdaya manusia nelayan dan aparatur perikanan, sedangkan konsumsi ikan dapat dibijaki dengan gemar makan ikan mulai anak-anak pada Taman Kanak, SD, SMP dan SLTA, juga memberikan asupan tambahan gizi bagi BUMIL (Ibu Hamil) dan Kampung-Kampung dengan tingkat konsumsi ikan rendah, selain itu berbagai produk pengolahan perikanan yang dapat dikonsumsi secara langsung sebagai snack atau cemilan.

B. Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021.

Rencana kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2019 – 2023, diimplementasikan melalui rencana kerja Tahun 2021, yang diakuisisi melalui dokumen anggaran Dinas Perikanan dengan sumber dana, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus serta Dana Otonomi Khusus. Realisasi anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	14.999.950	14.999.950	100%

	Kinerja SKPD.			
	2. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor.	22.575.000	22.575.000	100%
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.450.000	5.450.000	100%
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD.	183.820.000	183.792.650	99,99%
	5. Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.070.000	23.070.000	100%
	6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.599.900	54.272.335	72,18%
	7. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	17.000.000	17.000.000	100%
	8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.049.000	106.049.000	100%
	9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.999.996	54.999.996	100%
2	B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
	1) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Aimando Padaido, 6 Unit.	858.000.000	852.654.000	99,38%
	2) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Padaido, 6 Unit	858.000.000	853.941.000	99,52%
	3) Penangkapan Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Ikan di Distrik Numfor Barat, 5 Unit.	715.000.000	711.645.000	99,53%

	4) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Swandiwe, 5 Unit	715.000.000	712.910.000	99,71%
	5) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Oridek, 4 Unit	572.000.000	570.350.000	99,71%
	6) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Biak Kota, 3 Unit.	429.000.000	425.178.000	99,11%
	7) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Yendidori, 2 Unit.	286.000.000	283.000.000	98,95%
1	8) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Biak Utara, 2 Unit.	286.000.000	284.449.000	99,46%
	9) Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT Beserta Mesin, API dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan di Distrik Bondifuar, 1 Unit	143.000.000	142.114.000	99,38%
	10) Pengadaan Jaring Insang Gillnet, 300 Buah	300.000.000	296.670.000	98,89%

	11) Pengadaan Lampu Aki dan Cash, 86 Unit	258.000.000	257.590.000	99,84%
	12) Pengadaan Coolbox, 75 Unit	337.500.000	337.053.000	99,87%
	13) Pengadaan GPS, 75 Unit	240.000.000	230.752.000	96,15%
	14) Penunjang DAK	212.380.000	212.380.000	100%
	15) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.428.350.000	1.378.046.656	96,48%
	C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	1) Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro & Kecil, Sorido	198.000.000	197.610.000	99,80%
	2) Perencanaan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro & Kecil	6.120.000	5.970.000	97,55%
	3) Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro & Kecil	8.000.000	7.950.000.00	99,4%
	D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
	1) Belanja Bibit Ikan Nila	360.000.000	356.194.000	98,94%
	2) Pengadaan Pakan Ikan	140.000.000	139.670.000	99,76%
	E. Belanja Tidak Langsung	3.871.730.980	3.642.259.044	94,07%
	Jumlah	12.725.644.826	12.353.032.511	97,07%

Merujuk pada Tabel 3.7, maka belanja langsung yang membiayai program penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi sebesar 94,02%, sedangkan program pengelolaan perikanan tangkap sebesar 99,11%, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar 98,92%, program pengelolaan perikanan budidaya sebesar 99,35% dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 94,07%.

Realisasi Anggaran Dinas Perikanan tahun 2021, turut berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Biak Numfor karena memberikan nilai tambah terhadap pembudidaya dan nelayan penangkap ikan yang setiap harinya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging ikan. Selain turut mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto, ada juga kekayaan alam Indonesia berupa sumber daya laut yang ikut berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia yang dikonversi dalam wujud Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam subsector Kelautan, bagian ini menjadi tambahan pendapatan asli daerah yang selayaknya dikembalikan kepada perangkat daerah pengelolanya. Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam subsector Kelautan, terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Produk Domestik Regional Bruto dan DBH sub Kelautan Tahun 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Ket.
1			
2	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERIKANAN (DBH SDA IKAN)		
	DBH SDA IKAN TAHUN 2019	983.593.000,-	
	DBH SDA IKAN TAHUN 2020	1.418.316.00,-	
	DBH SDA IKAN TAHUN 2021	1.128.319.00,-	

Sumber : BPS Tahun 2020 dan PMK No.....

Table 3.9 Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2020 dan 2021

No.	Realisasi Anggaran 2020	Realisasi %	Realisasi Anggaran 2021	Realisasi %	Ket.
1	9.756.269.223	97,52%	12.353.032.511	97,07%	-

Realisasi Anggaran Tahun 2020 dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 9.756.269.223 menjadi Rp.12.353.032.511.

BAB IV
PENUTUP

Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, mendeskripsikan Kinerja Dinas Perikanan sebagaiberikut :

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, meningkat sebesar 10,05% karena adanya peningkatan ekspor produk perikanan yang didorong oleh beberapa Kementerian/Lembaga Teknis.
2. Sarana Tangkap berupa Perahu Motor, Perahu Tanpa Motor, Pancing, Gillnet dan Alat Tangkap lainnya terbanyak di Distrik Aimando Padaido, distrik Padaido, dan paling sedikit berada di Distrik Bondifuar.
3. Program kegiatan pengembangan pengelolaan perikanan tangkap yang realisasi anggarannya terbesar dan diikuti oleh program pengelolaan perikanan budidaya.
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sub sektor Kelautan sebesar Rp. 1.128.319.00,-

Saran

Peluang usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan masih menjadi unggulan pemerintah pusat, sehingga dorongan dalam memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha domestik dan manca negara masih terus ditingkatkan, khususnya pelaku usaha yang akan memberikan *multiplier effect* kepada para nelayan lokal.

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan memberikan sumbangsih terhadap PDRB juga memberikan peluang lapangan kerja, sehingga nilai manfaat ini perlu diakuisisi dalam memberikan spirit dan tambahan kinerja bagi ASN dilingkungan Dinas Perikanan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Biak Numfor

EFFENDI IGIRSA, S.Pi.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690424 199703 1 001

BAB IV
PENUTUP

Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, mendeskripsikan Kinerja Dinas Perikanan sebagaiberikut :

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, meningkat sebesar 10,05% karena adanya peningkatan ekspor produk perikanan yang didorong oleh beberapa Kementerian/Lembaga Teknis.
2. Sarana Tangkap berupa Perahu Motor, Perahu Tanpa Motor, Pancing, Gillnet dan Alat Tangkap lainnya terbanyak di Distrik Aimando Padaido, distrik Padaido, dan paling sedikit berada di Distrik Bondifuar.
3. Program kegiatan pengembangan pengelolaan perikanan tangkap yang realisasi anggarannya terbesar dan diikuti oleh program pengelolaan perikanan budidaya.
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sub sektor Kelautan sebesar Rp. 1.128.319.00,-

Saran

Peluang usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan masih menjadi unggulan pemerintah pusat, sehingga dorongan dalam memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha domestik dan manca negara masih terus ditingkatkan, khususnya pelaku usaha yang akan memberikan *multiplier effect* kepada para nelayan lokal.

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan memberikan sumbangsih terhadap PDRB juga memberikan peluang lapangan kerja, sehingga nilai manfaat ini perlu diakuisisi dalam memberikan spirit dan tambahan kinerja bagi ASN dilingkungan Dinas Perikanan.


Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Biak Numfor
EFFENDY IGKSA, S.Pi., MM
Panglima Utama Muda
NIP. 19690424 199703 1 001